

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023



Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu. Telp : (0451) 456885, 411289, 428503

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Perubahan Renja (Rencana Kerja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2023. Perubahan Renja 2023 ini mengacu pada Perubahan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun.

Perubahan Renja Tahun 2023 disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan industri dan perdagangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Perubahan Renja Tahun 2023 diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terlaksana dengan baik, sesuai harapan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Demikian perubahan Renja ini disusun, diharapkan penyelenggaraan rencana kegiatan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Palu

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah,



RICHARD ARNALDO, SE. MSA
NIP. 19821123 200604 1 006

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN REVIEW	
KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	4
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	5
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	51
4.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB V PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 2.1	Rekapitulasi evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan periode 2021	5
Tabel 2.2	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	9
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	38
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
Tabel 3.3	Pagu anggaran Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	42
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023	46
Tabel 4.1	Ranwal RKPD-P TA. 2023	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra, dan Renja. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Strategis Renstra Perindustrian dan Perdagangan periode Tahun 2021 – 2026, dari segi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pagu anggaran. Untuk Nomenklatur program kegiatan, seluruhnya mengacu pada RKPD Tahun 2023 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi, Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Permendagri 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142. Tanggal Penetapan Perda 30 Desember 2022
13. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2022 Nomor 864. Tanggal Penetapan Pergub 30 Desember 2022
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
1. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021- 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah sebagai arah, pedoman dan penyesuaian kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 1 tahun sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renja perubahan ini adalah menjabarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 dan menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	PENDAHULUAN
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN REVIEW KINERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Hasil pelaksanaan APBD pada Tahun 2021 dicapai berdasarkan 2 (dua) aspek yaitu anggaran dan kinerja. Pada aspek realisasi anggaran dapat dibagi menjadi APBD dan APBN. Realisasi APBD dibagi menjadi Belanja langsung dan Belanja tidak langsung. Belanja langsung 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp.22.115.534.047 dengan realisasi Rp. 19.645.942.472 (88,83%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Belanja Tidak Langsung Tahun 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.824.952.572 dengan realisasi Rp.10.408.928.751 (88,03%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Belanja APBN Tahun 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.084.108.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.054.294.096,- (98,57%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Total keseluruhan pagu belanja Tahun 2021 sebesar Rp. 32.158.435.983,66 dengan realisasi total sebesar Rp. 30.800.924.803,- (95,77%).

Rekapitulasi evaluasi kinerja pada hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan s/d akhir periode Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan periode 2021

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2021			Kategori
					Target	Realisasi*	Capaian*	
1	Pengembangan kawasan industri	1	Jumlah Pertumbuhan Industri	Persen	7,80 - 8,00	24,26	311,03	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah	2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	11,59	6,41	55,31	Rendah
3	Meningkatnya ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa	3	Ekspor bersih perdagangan	Juta US\$	1.200	4.902,86	408,57	Sangat Tinggi

Tabel realisasi Tahun 2021 diatas berisi realisasi indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD selama tahun berjalan. Secara keseluruhan terdapat 3 indikator kinerja dari 3 sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi yang diukur pada Laporan Kinerja Tahun 2021. Dari keseluruhan 3 indikator kinerja tersebut, dua indikator kinerja tersebut melampaui target yang ditetapkan sedangkan 1 indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.2.1. Bidang Industri

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun sebelumnya, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Disperindag, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Memaksimalkan pembangunan sentra IKM khususnya di Kabupaten Morowali Utara, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui

- kegiatan: fasilitas pembentukan pengurus, meningkatkan kemampuan kegiatan usaha, mendirikan unit pelayanan teknis, pendidikan dan pelatihan bagi TPL dan konsultan bagi SIKIM di kabupaten/kota se Sulawesi Tengah;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan secara efektif Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2018-2038 dan memaksimalkan pembentukan peraturan daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) diseluruh kabupaten/kota Sulawesi Tengah khususnya untuk Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Morowali dan Buol;
 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah akan memfasilitasi sertifikat halal produk pangan, fasilitasi pendampingan dan sertifikasi GMP bagi IKM pangan, fasilitasi pengujian nutrisi produk IKM pangan sosialisasi legalitas usaha pada 13 (tiga belas) kabupaten/kota Sulawesi Tengah;
 4. Perlu dilakukan pendataan yang valid dan menyeluruh terutama tentang jumlah IKM di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan melakukan pemetaan IKM-IKM unggulan daerah.
 5. Perlu pendataan perusahaan dan IKM besar yang mampu dan layak agar mampu di masukan kedalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
 6. Izin makanan dalam negeri rumah coklat belum dapat di terbitkan karena gedung sebagai tempat produksi harus di renovasi dan kedepannya makanan dalam negeri tersebut dapat segera diterbitkan.
 7. Meningkatkan sarana prasarana dan SDM aparatur pembina teknis/tenaga teknis teknis/operator mesin produksi baik rumah coklat, rumah tenun maupun rumah kemasan yang ada di provinsi/kabupaten/kota.

2.2..2 Bidang Perdagangan

1. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, yang diindikasikan oleh tingkat inflasi yang terkendali, terutama inflasi kelompok bahan makanan melalui pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok;
2. Revitalisasi sistem informasi harga barang kebutuhan pokok dengan menjadikan pedagang di pasar-pasar barometer baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang dapat di jadikan sebagai big data dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pelaksanaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat harus mengacu pada pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang telah di tetapkan oleh menteri perdagangan setiap tahun:

- a) Pemerintah daerah penerima dana tugas pembantuan diharapkan lebih proaktif dalam proses pengajuan hibah.
 - b) Terkait pembangunan pasar yang terjadi permasalahan pada Kabupaten Toli-Toli atas keterlambatan pembangunan pasar agar dapat mengikuti anjuran KPPN dan tidak untuk melaksanakan pembangunan pasar tersebut dengan menggunakan biaya sendiri.
4. Terdapat beberapa kendala operasional dalam pelaksanaan sistem resi gudang, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan gudang dan sarana prasarana penunjang, terutama pengelola gudang, akses pemasaran terhadap produk resi gudang serta ketersediaan lembaga pembiayaan. Selain itu, perlu dilakukan sinergi kebijakan terkait implementasi sistem resi gudang antara pemerintah pusat dan daerah terutama dukungan dan komitmen pemerintah daerah.
 5. Melakukan koordinasi pengawasan provinsi dan kabupaten dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah.
 6. Dalam rangka memaksimalkan pembentukan unit kemetrologian legal provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah didorong untuk menjadi fasilitator dalam penyusunan kerja sama.
 7. Pemerintah daerah penerima dana tugas pembantuan diharapkan lebih pro aktif dalam proses pengajuan hibah dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik itu pengelola pasar, pedagang, maupun konsumen salah satunya dengan melakukan “Program Pelatihan Tektik Pengelolaan Pasar”.
 8. Pemerintah provinsi diharapkan turut memantau pembangunan pasar rakyat oleh pemerintah kabupaten dan kota yang telah mendapatkan bantuan tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 9. Dalam rangka meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengembangan produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing, yang dilakukan melalui strategi menentukan produk unggulan yang berorientasi ekspor berdasarkan sektor prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah;
 10. Meningkatkan mutu produk ekspor dapat dicapai melalui peningkatan kelembagaan mutu di provinsi dan peningkatan pengawasan mutu.
 11. Peningkatan akses dan pangsa pasar di dalam negeri dan luar negeri meliputi:
 - a. Pangsa pasar produk Sulawesi Tengah di pasar domestik
 - b. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi utama
 - c. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi prospekti

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Dari hasil perbandingan antara rancangan awal RKPD yang didasarkan pada data dalam Renstra 2021–2026 dengan hasil analisis kebutuhan berdasarkan KUA-PPAS, terdapat perbedaan pada besaran pendanaannya tetapi pada Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan tetap sama.

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana (Rp)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	3	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					18.885.410.659	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3	3	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks	15.422.700.659		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks		16.447150.467	
3	3	0	1	1,0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	67 Nilai Indeks	731.864.065		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	67 Nilai Indeks		715.668.000	
3	30	01	1,0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	664.688.115	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	561.738.000	
3	30	01	1,0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.107.500	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	12.825.000	
3	30	01	1,0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.757.500	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	7.350.000	
3	30	01	1,0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.637.500	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	5.725.100	

3	30	01	1,0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.262.800	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3.750.000
3	30	01	1,0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.537.900	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	
3	30	01	1,0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen	25.872.750	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	124.279.700
3	30	01	1,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	12.848.003.594		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %		13.405.087.893
3	30	01	1,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/	Bulan 10,979,740,269	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	11.504.639.643
3	30	01	1,0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.239.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1.239.00000
3	30	01	1,0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	308,970,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	321.000.000

3	30	01	1,0 2	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	73,293,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	72.053.800
3	30	01	1,0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	49.762.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	53.257.550
3	30	01	1,0 2	0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	79.992.325	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	92.009.100
3	30	01	1,0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	61.038.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran S dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	67.037.800

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan Berdasarkan KUA-PPAS				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Program/	Target Capaian	Lokasi	Kebutuhan Dana (Rp)	

					Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan					
3	30	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	56.208.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	56.060.000
3	30	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Laporan	211.233.000		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Laporan		253.126.030
3	30	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	91,406,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	93.110.000
3	30	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24.590.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	65.177.080
3	30	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	31.025.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	31.624.950
3	30	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan 0 Laporan	64.212.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan 0 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	63.214.000
3	30	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stokeholder)	79 Nilai Indeks	110.861.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stokeholder)	79 Nilai Indeks		182.186.000

3	30	01	1,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	23.900.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	28.650.000
3	30	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	83.001.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	146.936.000
3	30	01	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	3.960.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	6.600.000
3	30	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan	439.888.300		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan		528.097.855
3	30	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.937.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	12.911.296
3	30	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	155.233.200	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	181.421.759
3	30	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	60.348.100	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	60.369.800

3	30	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	52,800,000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokume	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	50.400.000
3	30	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	158.570.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222.995.000
3	30	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	686.536.400		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		711.602.020
3	30	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	356.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	300.000.
3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan 0 Laporan	471.820.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan 0 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	521.940.400
3	30	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	214.360.400	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	189.361.620

3	30	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	394.314.300		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		353.584.300
3	30	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	240.934.300	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	211.984.300
3	30	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit 0 Unit	108.380.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	115 Unit 0 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	126.600000
3	30	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	15.000000
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C (%)	100 %	310.010.000		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C (%)	100 %		309.763.100

3	30	02	1,02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	69.455.400		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen		72.809.100
3	30	02	1,02	01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	69.455.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.809.100
3	30	02	1,04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	1 Laporan	240.554.600		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	1 Laporan		236.954.000
3	30	02	1,04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	240.554.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236.954.000
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100 %	137.570.000		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100 %		170.080.450

3	30	03	1,01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1 Dokumen	137.570.000		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	1 Dokumen		170.080.450
3	30	03	1,01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah laporan penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	68.785.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah laporan penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.132.450
3	30	03	1,01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pengguna pasar lelang komoditas yang berpartisipasi	2 Orang	68.785.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pengguna pasar lelang komoditas yang berpartisipasi	2 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88.948.000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100 %	1.643.210.000		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100 %		3.009.921.500
3	30	04	1,01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	257.732.850		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen		150.468.350
3	30	04	1,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	171.821.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91.075.450

3	30	04	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	85.910.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.392.900
3	30	04	1,02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	1 Dokumen	1.299.566.200		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	1 Dokumen		2.753.345350
3	30	04	1,02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4 Laporan	171.821.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	925.258.650
3	30	04	1,02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	1.127.744.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.828.086.700

3	30	04	1,03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	100 %	85.910.950		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	100 %		106.107.800
3	30	04	1,03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 Laporan	85.910.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106.107.800
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	9,634.00 Juta USD	934.550.000		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	9,634.00 Juta USD		643.876.800
3	30	05	1,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1 Laporan	934.550.000		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1 Laporan		643.876.800
3	30	05	1,01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	3 Pelaku Usaha	75.601.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	3 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117.510.900

3	30	05	1,01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	24 Pelaku Usaha	643.643.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	24 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	311.450.000
3	30	05	1,01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	2 Produk	34.548.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	2 Produk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.541.500
3	30	05	1,01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	10 Pelaku Usaha	180.756.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	10 Pelaku Usaha	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161.374.400
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi dan pemasaran produk dalam negeri yang terfasilitasi	20 %	437.370.000		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi dan pemasaran produk dalam negeri yang terfasilitasi	20 %		280.974.900
3	30	07	1,02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	358.332.700		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan		182.295.650
3	30	07	1,02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	25 UMKM	358.332.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	25 UMKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182.295.650

3	30	07	1,03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	79.037.300		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan		98.679.250
3	30	07	1,03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	79.037.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98.679.250
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.854.130.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			98.679.250	
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %	1.234.650.000		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100 %		2.921.828.650
3	31	02	1,01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen	1.234.650.000		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen		2.368.349.000
3	31	02	1,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	2 Dokumen	270.250.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	2 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53.646.0

3	31	02	1,01	03	02	1,01	04	02	1,01	03	02	1,01	06	02	1,01	03	03	03	1,01	03	31	3	
Koordinasi, dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri	Koordinasi, dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, dan Pelaksanaan, dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, dan Pelaksanaan, dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, dan Pelaksanaan, dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana pembangunan Industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI yang memiliki Usaha Industri Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi	Perubahan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha (IU), Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri (UKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (PKI) Kewenangan Provinsi
239.941.150	239.941.150	429.691.150	429.691.150	556.691.300	147.766.400	147.766.400	556.691.300	556.691.300	147.766.400	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000	320.430.000
Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	Sema Kab/Kota, Sema Kecamatan, Sema n, Sema Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	274.429.950	

3	31	03	1,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	132.280.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125.351.950
3	31	03	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	188.150.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149.078.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase data industri yang terdaftar dalam SIINas	64 %	299.050.000		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase data industri yang terdaftar dalam SIINas	64 %		279.049.700

3	31	04	1,01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	299.050.000		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen			279.049.700	
3	31	04	1,01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	66.406.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		64.866.000	
3	31	04	1,01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	54.129.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		113.982.500	
3	31	04	1,01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	178.513.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.201.200	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.460.113.676	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.446.563.519

3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks	805.283.676		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks		827.499.286
3	30	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	335.560.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %		329.760.000
3	30	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	335.560.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	329.760.000
3	30	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan	158.903.952		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan		164.356.590
3	30	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.237.452	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	3.237.250
3	30	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.233.550	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	51.028.190
3	30	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.761.950	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	27.055.150

3	30	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	90.671.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.036.000
3	30	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	224.039.424		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		231.450.696
	30	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.998.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	12.348.000
3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	168.737.496	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	168.737.496
3	30	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.303.928	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	50.365.200
3	30	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	86.780.300		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		101.932.000

3	30	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1.570.300	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	4.182.000
3	30	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46.450.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	47.950.000
3	30	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	38.760.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	49.800.000
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	3 %	654.830.000		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	3 %		619.064.233
3	30	06	1,02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kinerja PSMB	77 Nilai Indeks 3 Nilai Indeks	654.830.000		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kinerja PSMB	77 Nilai Indeks 3 Nilai Indeks		619.064.233
3	30	06	1,02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	3 Komoditi	137.457.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	3 Komoditi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.645.300
3	30	06	1,02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1 Dokumen	189.957.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174.769.222

3	30	06	1,02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikat produk yang diterbitkan	2 Sertifikat	137.457.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikat produk yang diterbitkan	2 Sertifikat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123.142.400		
3	30	06	1,02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	150 Sertifikat	at 189,957,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	150 Sertifikat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180.507.311		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.128.529.349	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						997.672.570
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks	1.128.529.349		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks		997.672.570		
3	30	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	635.160.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %		635.160.000		
3	30	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	635.160.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	635.160.000		
3	30	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan	78.701.619		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan		89.776.600		
3	30	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.264.544	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	4.140.000		

3	30	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	47.010.325	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	47.010.100
3	30	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.536.750	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	12.286.500
3	30	01	1,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.890.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	11.640.000
3	30	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	204.917.730		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		14.700.000
3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	200.885.730	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	164.635.970
3	30	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.032.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	4.200.000

3	30	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		209.750.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		103.900.000
3	30	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit		64.200.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	75.000.000
3	30	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		65.550.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	28.900.000
3	30	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		80.000.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				497.110.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.003.341.698
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase layanan IKM	100 %		497.110.000		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase layanan IKM	100 %		1.003.341.698
3	31	02	1,01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	959 Layana IKM		497,110,000		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	959 Layana IKM		1.003.341.698

3	31	02	1,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	497.110.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.003.341.698
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.859.463.965	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks	569.513.935		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)	64 Indeks		404.633.815
3	30	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	251.160.000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %		251.160.000
3	30	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	251.160.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	251.160.000
3	30	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan	51.555.425		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen 1 Laporan		49.888.040
3	30	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.435.425	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1.583.800
3	30	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.120.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	15.870.000

3	30	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		223.819.710		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		68.468.875
3	30	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		222.379.710	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	66.968.875
3	30	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1.440.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	1500.000
3	30	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		42.978.800		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen 1 Laporan		35.116.900
3	30	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		4.018.800	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	2.356.900
3	30	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		28.960.000	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Palu, Palu Timur, Lolu Selatan	32.760.000

3	30	06	1,03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	2 Laporan	163.707.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	2 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	163.707.350
3	30	06	1,03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang ditangani	4 Kasus	163.707.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang ditangani	4 Kasus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	163.707.800
TOTAL								25.049.637.619						

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian antara lain:

1. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil. Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah pengembangan industri petrokimia di Teluk Bintuni. Pengembangan industri industrial vegetable oil / industrial lauric oil (IVO/ILO), dimana IVO/ILO merupakan hasil pemrosesan CPO yang menurunkan kadar getah dan metal.
2. Kegiatan prioritas dalam rangka penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan Koperasi. Pengembangan sentra industri kecil menengah (IKM) dan mengembangkan produk IKM.
3. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Melakukan pendampingan pada pabrikan untuk meningkatkan ekspor. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah ajang temu bisnis Internasional.
4. Kegiatan prioritas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0. Kemenperin berencana mengembangkan data industri 4.0 dan pembangunan pusat inovasi dan pengembangan industri 4.0.
5. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing SDM. Hal tersebut akan dilakukan melalui pelatihan industri berbasis kompetensi dan pendidikan vokasi dan kejuruan industri berbasis kompetensimenuju dual system.
6. Program Pelaksanaan Anti Korupsi.

3.1.2 Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan antara lain :

1. Pembangunan dan revitalisasi 119 unit pasar rakyat tipe C dan D.
2. Membangun pusat jajanan dan souvenir.
3. Menjalankan Program perlindungan konsumen.
4. Program optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang.

5. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting.
6. Pelaksanaan EXPO
7. Melaksanakan program misi dagang, pameran, dan promosi luar negeri.
8. Program untuk perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.
9. Program pemberian fasilitas perizinan dan fasilitas ekspor impor.
10. Program pengembangan sarana dan prasarana Kemendag.
11. Program pengembangan sumber daya manusia Kemendag.
12. Program pelaksanaan anti Korupsi.

3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun

2023 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :

1. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
2. Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan umum dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 tersaji padatable 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20
			2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	3.828,92	5.203,94	5.849,88	6.648,15	6.903,07	7.274,98
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan		5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37%	11,69%	12,00%	12,60%	13,20%	13,80%

		2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.097	1.371	1.646	1.920	2.194	2.468
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.823	67.911	68.000	68.088	68.176	68.264
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	11-14	11-14	11-14	11-14	11-14
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	3 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	9 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,05	64,5	66,5	68,5	70	71

Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	1 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			2 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
			1 Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	2 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi

			perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	1 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			2 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	1 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			2 Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	1 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			2 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data	1 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

		perusahaan industri	2	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri
--	--	---------------------	---	---

3.3 Program dan Kegiatan

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 program dengan pagu anggaran tersaji pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pagu anggaran Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Program	Pembiayaan (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.838.433.096	
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.041.964.616	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	463.799.850	
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	99.999.675	
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	209.799.875	
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	996.878.925	
7	Pogram Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	334.899.975	
8	Program Pengembangan Ekspor	1.199.609.850	
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	205.189.550	
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	243.541.450	
	Jumlah Dinas	23.634.116.862	

Pada Tahun 2022 pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 23.634.116.862 yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

- **Bidang Fasilitas dan Informasi Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- **Bidang pembinaan dan Pengembangan Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

- **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan- 2 : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Kegiatan- 3 : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 3 : Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

• **Bidang perdagangan Luar Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

• **UPT – Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh

Daerah Kabupaten/Kota.

- **UPT – Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah:**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

- **UPT – Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022 (TAHUN N)			
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Urusan Pilihan Perindustrian				29.077.388.776	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				29.077.388.776	
	Prog. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				2.861.565.700	
	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	-	Pertumbuhan Industri Besar		2.861.565.700	APBD
		-	Fasilitasi Penguatan Industri			
	Prog. STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		840.357.000	
	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				336.142.800	APBD

	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan					168.071.400	APBD
	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya					336.142.800	APBD
	Prog.	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	Jumlah penanganan sengketa konsumen (kasus)			827.991.000	
	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					496.794.600	APBD
	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					331.196.400	APBD
	Prog.	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	Ekspor bersih perdagangan (Juta US\$)		1,1	315.335.000	
	Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					315.335.000	APBD
	Prog.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					1.376.782.000	

	Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota					1.376.782.000	APBD
	Prog.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					18.662.082.176	
	Keg.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			642.709.680	APBD
	Keg.	Administrasi Keuangan	-	Cakupan layanan administrasi perkantoran			11.790.385.776	APBD
	Keg.	Administrasi Umum	-	Cakupan layanan sarana & prasarana kerja aparatur			5.912.286.720	APBD
	Keg.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD			316.700.000	APBD
			-	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai				
			-	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				
			-	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja & keuangan				
		UPT. PSMB					1.987.023.000	

	Prog.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	Cakupan layanan administrasi perkantoran			1.543.729.500	
	Keg.	Administrasi Keuangan					199.800.000	APBD
	Keg.	Administrasi Umum	-	Cakupan layanan sarana & prasarana kerja aparatur			1.285.269.400	APBD
	Keg.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					58.660.100	APBD
			-	Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				
	Prog.	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	Jumlah Komoditi yang di Uji			443.293.500	
			-	Jumlah Alat yang di Kalibrasi				
	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					443.293.500	APBD
		UPT. P2IPK					2.206.252.900	
	Prog.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	Cakupan layanan administrasi perkantoran			1.237.834.800	
	Keg.	Administrasi Keuangan					489.000.000	APBD
	Keg.	Administrasi Umum	-	Cakupan layanan sarana & prasarana kerja aparatur			748.834.800	APBD
	Keg.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
			-	Presentase sumber				

				daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				
	Prog.	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani			968.418.100	
	Keg.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi					968.418.100	APBD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2023

4.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan ranwal RKPD-P TA. 2023, umumnya merupakan usulan para pemangku kepentingan dan wakil masyarakat dan instansi terkait lainnya, yaitu guna memudahkan dan membantu pelaku usaha dalam peningkatan daya saing usaha dan peningkatan IKM serta perlindungan konsumen bagi masyarakat. Adapun ranwal RKPD-P TA. 2023 tersaji pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Ranwal RKPD-P TA 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Ranwal RKPD-P Tahun-2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun-2024			
						Target	Rp			Target	Rp	Rp	Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	12	13			8			9
											25,701,857,513	24,901,857,513	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	3 3 0 0 1 1	Pro. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	64	16,447,150,467	PAD, DAU, SILPA		66	16,010,032,329	16,010,032,329	15,229,990,000
		3 3 0 0 1 1	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	Indeks	B	715,668,000	PAD		B	716,334,866	716,334,866	716,334,631
		3 3 0 0 1 1	Sub. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	561,738,000	PAD		1	562,404,866	562,404,866	

3	3	0	1.	0	Sub	Koordinasi	Jumlah	Doku	1	12,825,00	PAD		1	12,825,	12,825,
0	1	0	0	2	Keg.	dan	Dokumen	men		0				000	000
			1			Penyusunan	RKA-SKPD								
						Dokumen	dan Laporan								
						RKA-SKPD	Hasil Koordinasi								
							Penyusunan								
							Dokumen RKA-								
							SKPD								
3	3	0	1.	0	Sub	Koordinasi	Jumlah	Doku	1	7,350,000	PAD		1	7,350,0	7,350,0
0	1	0	0	3	Keg.	dan	Dokumen	men						00	00
			1			Penyusunan	Perubahan								
						Dokumen	RKA-SKPD								
						Perubahan	dan Laporan								
						RKA-SKPD	Hasil								
							Koordinasi								
							Penyusunan								
							Dokumen								
							Perubahan								
							RKA-SKPD								
3	3	0	1.	0	Sub	Koordinasi	Jumlah	Doku	1	5,725,100	PAD		1	5,725,1	5,725,1
0	1	0	0	4	Keg.	dan	Dokumen	men						00	00
			1			Penyusunan	DPA-								
						DPA-SKPD	SKPD dan								
							Laporan Hasil								
							Koordinasi								
							Penyusunan								
							Dokumen								
							DPA-								
							SKPD								
3	3	0	1.	0	Sub	Koordinasi	Jumlah	Doku	1	3,750,200	PAD		1	3,750,2	3,750,2
0	1	0	0	5	Keg.	dan	Dokumen	men						00	00
			1			Penyusunan	Perubahan								
						DPA-SKPD	dan Laporan								
							Hasil								
							Koordinasi								
							Penyusunan								
							Dokumen								
							Perubahan								
							DPA-								
							SKPD								

3 0 1 0 1	3 0 1 0 6	0 1 0 1	1 0 6	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	0	0			0	0	0
3 0 1 0 1	3 0 1 0 7	0 1 0 1	1 0 7	0	Sub Keg.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an	1	124,279,7 00	PAD		1	124,279 ,700	124,279 ,700
3 0 1 0 2	3 0 1 0 2	0 1 0 2	1 0 2		Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	90	13,405,08 7,893	PAD		90	13,442, 977,893	13,442, 977,893
3 0 1 0 2	3 0 1 0 1	0 1 0 2	1 0 1	0	Sub Keg.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	105	11,504,63 9,643	PAD, DAU, SILPA		105	11,504, 639,643	11,504, 639,643
3 0 1 0 2	3 0 1 0 2	0 1 0 2	1 0 2	0	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku men	1	1,239,000, 000	PAD		1	1,239,0 00,000	1,239,0 00,000
3 0 1 0 2	3 0 1 0 3	0 1 0 2	1 0 3	0	Sub Keg.	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi	Doku men	500	321,030,0 00	PAD		500	364,920 ,000	364,920 ,000

	Keuangan SKPD	kasi Keuangan SKPD										
3 3 0 1. 0 0 1 0 4 2	Sub Keg.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	72,053,800	PAD		12	72,053,800	72,053,800	
3 3 0 1. 0 0 1 0 5 2	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15	53,257,550	PAD		15	53,257,550	53,257,550	
3 3 0 1. 0 0 1 0 6 2	Sub Keg.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	92,009,100	PAD		5	92,009,100	92,009,100	
3 3 0 1. 0 0 1 0 7 2	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	14	67,037,800	PAD		14	67,037,800	67,037,800	

					Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD									
3	3	0	1.0	Sub	Penyusunan	Jumlah	Doku	1	56,060,00	PAD		1	50,060,000	50,060,000
	0	1	08	Keg.	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	men							
			2											
3	3	0	1.0	Keg.	Administrasi	Jumlah	lapor	14	253,126,030	PAD		14	257,625,950	257,625,950
	0	1	03	.	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	an							
3	3	0	1.0	Sub	Pengamanan	Jumlah	Doku	10	93,110,000	PAD		10	93,110,000	93,110,000
	0	1	02	Keg.	Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	men							
			3											
3	3	0	1.0	Sub	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Lapor	1	65,177,080	PAD		1	65,177,000	65,177,000
	0	1	04	Keg.	Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD	an							
			3											
3	3	0	1.0	Sub	Rekonsiliasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	Lapor	2	31,624,950	PAD		2	31,624,950	31,624,950
	0	1	05	Keg.	Laporan		an							
			3											

	Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
3 3 0 1. 0 0 1 0 6 3	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	63,214,000	PAD		1	67,714,000	67,714,000		
3 3 0 1. 0 0 1 0 5	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stakeholder)	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	182,186,000	PAD		B	35,250,000	35,250,000		
3 3 0 1. 0 0 1 0 2 5	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	PAD		0	0	0		
3 3 0 1. 0 0 1 0 3 5	Sub Keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	28,650,000	PAD		4	28,650,000	28,650,000		
3 3 0 1. 0 0 1 0 9 5	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	16	146,936,000	PAD		18				

3	3	0	1.	1	Sub	Sosialisasi	Jumlah Orang	Orang	42	6,600,000	PAD		42	6,600,000	6,600,000	
0	1	0	0	0	Keg.	Peraturan Perundang-Undangan	yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
3	3	0	1.	1.	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	1	528,097,855	PAD		1	528,097,700	528,097,700	
0	1	0	0	6												
3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah Paket	Paket	4	12,911,296	PAD		4	12,911,200	12,911,200	
0	1	0	0	1	Keg.	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									
3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah Paket	Paket	4	181,421,759	PAD		4	181,421,700	181,421,700	
0	1	0	0	4	Keg.	Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									
3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah Paket	Paket	4	60,369,800	PAD		4	60,369,800	60,369,800	
0	1	0	0	5	Keg.	Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan									
3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah	Doku	12	50,400,000	PAD		12	50,400,000	50,400,000	
0	1	0	0	6	Keg.	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	men								

3 0	3 1	0 0	1. 0	0 9	Sub Keg.	Penyeleng- gaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	50	222,995,0 00	PAD		50	222,995 ,000	222,995 ,000
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 7	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lapor an	1	297,798,3 69	PAD		0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 1	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	PAD		0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 2	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	PAD		0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 5	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0		PAD		0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 6	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	297,798,3 69	PAD		0	0	0

3 0 7	3 1 0 9	0 1 0 7	1 0 9	0	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0
3 0 7	3 1 0 0	0 1 0 7	1 0 0	1	Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0
3 0 8	3 1 0 8	0 1 0 8	1 0 8		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	711,602,0 20	PAD	1	596,161 ,620	596,161 ,620
3 0 8	3 1 0 8	0 1 0 8	1 0 1 8	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	13	300,000	PAD	13		
3 0 8	3 1 0 8	0 1 0 8	1 0 2 8	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	521,940,4 00	PAD	12	420,000 ,000	420,000 ,000
3 0 8	3 1 0 8	0 1 0 8	1 0 3 8	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	PAD	0	0	0
3 0 8	3 1 0 8	0 1 0 8	1 0 4 8	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	189,361,6 20	PAD	4	176,161 ,620	176,161 ,620

3 0	3 1	0 0	1. 0	9	Keg.	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	353,584,3 00	PAD	1	433,584 ,300	433,584 ,300
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 1 9	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	35	211,984,3 00	PAD	35	211,984 ,300	211,984 ,300
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 2 9	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	PAD			
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 5 9	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	PAD	0		
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 6 9	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	115	126,600,0 00	PAD	110	126,600 ,000	126,600 ,000

		3 3 0 1. 0 0 1 0 9 9	Sub Keg.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirch abilitas	Unit	0	0	PAD						
		3 3 0 1. 1 0 1 0 0 9	Sub Keg.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirch abilitas	Unit	1	15,000,00 0	PAD		1	95,000, 000	95,000, 000		
		3 3 0 0 2	Pro g.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB- Gol.B /MB Gol. C	%	100	309,763,1 00	PAD		100	339,310 ,000	339,310 ,000	339,310 ,000	
					Persentase penerbitan SKA	%	100		PAD		100				
		3 3 0 1. 0 2 0 1	Keg .	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Doku men	0	0	PAD		1	0	0		

						3 0	3 2	0 0	1. 0 2	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	Doku men	1	72,809,10 0	PAD		1	72,809, 100	72,809, 100	76,020, 000	
						3 0	3 2	0 0	1. 0 2	0 1	Sub Keg.	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Doku men	1	72,809,10 0	PAD		1	72,809, 100	72,809, 100	
						3 0	3 2	0 0	1. 0 3		Keg.	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya	Doku men	0	0	PAD		0	0	0	

3 3 0 1. 0 2 0 4	Keg .	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	Laporan	1	236,954,000	PAD		1	266,500,900	266,500,900	263,290,696
3 3 0 1. 0 0 2 0 1 4	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	1	236,954,000	PAD		1	266,500,900	266,500,900	
3 3 0 0 3	Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	%	100	170,080,450	PAD		100	150,580,000	150,580,000	150,580,000
3 3 0 1. 0 3 0 1	Keg .	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta	Dokumen	1	170,080,450	PAD		1	150,580,000	150,580,000	150,580,000

		Lelang Komoditas	Pasar Lelang Komoditas													
3 0	3 3	0 0	1. 0 2 1	0	Sub Keg.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Lapor an	1	81,132,45 0	PAD		1	75,290, 000	75,290, 000	
3 0	3 3	0 0	1. 0 3 1	0	Sub Keg.	Penataan, Pembinaan, dan Pengembang an Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	2	88,948,00 0	PAD		2	75,290, 000	75,290, 000	
3 0	3 0	0 4			Pro g.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	%	100	3,009,921, 500	PAD		100	1,798,5 50,000	1,798,5 50,000	1,798,5 50,000

3	3	0	1.		Keg	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	150,468,350	PAD		1	282,097,000	282,097,000	282,097,000
0	4	0	1													
3	3	0	1.	0	Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	4	91,075,450	PAD		4	141,048,500	141,048,500	141,048,500
0	4	0	1													
3	3	0	1.	0	Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	laporan	4	59,392,900	PAD		4	141,048,500	141,048,500	
0	4	0	2	1												

	3 3 0 1. 0 4 0 2	Keg .	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	Doku men	1	2,753,345, 350	PAD		1	1,422,4 20,700	1,422,4 20,700	1,422,4 18,096
	3 3 0 1. 0 0 4 0 1 2	Sub Keg.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Lapor an	4	925,258,6 50	PAD		4	284,483 ,600	284,483 ,600	284,483 ,619
	3 3 0 1. 0 0 4 0 2 2	Sub Keg.	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan	Lapor an	6	1,828,086, 700	PAD, DID		6	1,137,9 37,100	1,137,9 37,100	1,137,9 34,477

		Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi												
3 0	3 4	0 0	1. 0 3	Keg .	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	%	100	106,107,800	PAD		100	94,032,300	94,032,300	94,032,370
3 0	3 4	0 0	1. 0 0 3 3	Sub Keg.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	0	0	PAD		0	0	0	
3 0	3 4	0 0	1. 0 0 4 3	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Laporan	1	106,107,800	PAD		1	94,032,300	94,032,300	

				Bersubsidi dan Pestisida	Pupuk Bersubsidi dan Pestisida										
3	3	0		Pro	Pengembang	Nilai ekspor	Juta	21,108.5	643,876,8	PAD		23,6	694,540	694,540	694,540
0	0	5		g.	an Ekspor		USD	7	00			41.6	,000	,000	,000
3	3	0	1.	Keg	Penyelenggar	Jumlah Annual	Lapor	1	643,876,8	PAD		1	694,540	694,540	694,540
0	0	5	0	.	aan Promosi	Report	an		00				,000	,000	,000
			1		Dagang	Penyelenggaraa									
					melalui	n Promosi									
					Pameran	Dagang melalui									
					Dagang dan	Pameran									
					Misi Dagang	Dagang dan									
					bagi Produk	bagi Produk									
					Ekspor	Ekspor									
					Unggulan	Unggulan yang									
					yang	terdapat pada									
					terdapat	lebih dari 1									
					pada lebih	dari 1 (satu)									
					dari 1 (satu)	Daerah									
					Daerah	Kabupaten/Kot									
					Kabupaten/	a dalam									
					Kota dalam	Provinsi									
					Provinsi										
3	3	0	1.	Sub	Pameran	Jumlah Pelaku	Pelak	3	117,510,9	PAD		6	200,000	200,000	
0	0	5	0	Keg.	Dagang	Usaha yang	u		00				,000	,000	
			1		Internasional/	Difasilitasi	Usaha								
					Nasional	dalam Pameran									
					Dagang	Dagang									
3	3	0	1.	Sub	Pameran	Jumlah Pelaku	Pelak	24	311,450,0	PAD		24	311,450	311,450	
0	0	5	0	Keg.	Dagang Lokal	Usaha yang	u		00				,000	,000	
			2			Berorientasi	Usaha								
			1			Ekspor pada									
						Pameran Dagang									
					Lokal	Lokal									

3 0 1	3 5 0 4	0 0 1	1 0	0	Sub Keg.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produ k	2	53,541,50 0	PAD		2	53,541, 500	53,541, 500	
3 0 1	3 5 0 5	0 0 1	1 0	0	Sub Keg.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	10	161,374,4 00	PAD		10	129,548 ,500	129,548 ,500	
3 0 0	3 7	0			Pro g.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	%	20	280,974,9 00	PAD		20	150,357 ,513	150,357 ,513	150,360 ,000
3 0 0	3 7 0	0	1 0	1	Keg.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Lapor an	0	0	PAD		0	0	0	
3 0 1	3 7 0	0	1 0	1	Sub Keg.	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMK M	0	0	PAD		0	0	0	
3 0 2	3 7 0	0	1 0	2	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Lapor an	1	182,295,6 50	PAD		1	63,847, 700	63,847, 700	63,847, 700

						Produk Dalam Negeri	Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri											
		3	3	0	1	0	Sub Keg. Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMK M	25	182,295,650	PAD		25	63,847,700	63,847,700		
		3	3	0	1	0	Keg. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1	98,679,250	PAD		1	86,509,813	86,509,813	86,509,813	
		3	3	0	1	0	Sub Keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1	98,679,250	PAD		1	86,509,813	86,509,813		

3 3 0 1 2	Pro g.	Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	2,368,349, 000	PAD		100	944,203 ,800	944,203 ,800	944,203 ,800
3 3 0 1. 1 2 0 1	Keg	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna n Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Doku men	1	2,368,349, 000	PAD		1	944,203 ,800	944,203 ,800	944,203 ,800
3 3 0 1. 0 1 2 0 1 1	Sub Keg.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Doku men	0	0	PAD		0	0	0	
3 3 0 1. 0 1 2 0 2 1	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembang an, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Doku men	3	53,646,00 0	PAD		3	236,050 ,950	236,050 ,950	

3	3	0	1.	0	Sub	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Doku men	2	239,941,1 50	PAD		2	236,050 ,950	236,050 ,950
3	3	0	1.	0	Sub	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Doku men	1	429,691,1 50	PAD		1	236,050 ,950	236,050 ,950
3	3	0	1.	0	Sub	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Doku men	1	1,519,604, 600	PAD, DAU		0	0	0
3	3	0	1.	0	Sub	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Doku men	1	125,466,1 00	PAD		1	236,050 ,950	236,050 ,950

3 1	3 3	0 3		Pro g.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	%	100	274,429,9 50	PAD		100	289,430 ,000	289,430 ,000	289,430 ,000
3 1	3 3	0 0	1. 0 1	Keg .	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	lapor an	1	274,429,9 50	PAD		1	289,430 ,000	289,430 ,000	289,430 ,000

3	3	0	1	0	Sub	Fasilitasi	Jumlah	Doku	1	125,351,9	PAD						
1	3	0	1	1	Keg.	Pemenuhan	Dokumen	men		50			1	144,715	144,715		
						Komitmen	Hasil Fasilitasi							,000	,000		
						perolehan	Verifikasi										
						IUI, IPUI,	Teknis										
						IUKI, dan	Pemenuhan										
						IPKI	Kesesuaian										
						Kewenangan	Persyaratan										
						Provinsi	Teknis										
						dalam Sistem	Perizinan										
						Informasi	Berusaha										
						Industri	Sektor Industri										
						Nasional	dan/atau dalam										
						(SIINas) yang	Rangka										
						Terintegrasi	Perluasan										
						dengan	Usaha untuk										
						Sistem	Bidang Usaha										
						Pelayanan	dengan Risiko										
						Perizinan	Usaha										
						Berusaha	Menengah-										
						Terintegrasi	Tinggi dan										
						secara	Tinggi,										
						Elektronik	melalui										
							SIINas yang										
							Terintegrasi										
							dengan Sistem										
							OSS, bagi:										
							1) Industri										
							Besar; dan										
							2) Industri										
							Kecil dan										
							Industri										
							Menengah yang										
							Lokasinya										
							Lintas										
							Kabupaten/Kota,										
							3) Kawasan										
							Industri, dan										
							Perizinan										

			Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi									
3 3 0 1 4	Pro g.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	%	85	279,049,7 00	PAD		87	327,320 ,000	327,320 ,000	327,320 ,000
3 3 0 1. 1 4 0 1	Keg	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Doku men	1	279,049,7 00	PAD		1	327,320 ,000	327,320 ,000	327,320 ,000

		3 3 0 1. 0 1 4 0 1 1	Sub Keg.	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Doku men	1	64,866,00 0	PAD		1	64,866, 000	64,866, 000	0
		3 3 0 1. 0 1 4 0 2 1	Sub Keg.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Doku men	1	113,982,5 00	PAD		1	113,982 ,500	113,982 ,500	
		3 3 0 1. 0 1 4 0 3 1	Sub Keg.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi	Doku men	1	100,201,2 00	PAD		1	148,471 ,500	148,471 ,500	

			Data ke SIINas	dalam Penyampaian Data ke SIINas									
Jumlah I (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)						23,783,59 5,867	PAD			20,704, 323,642	20,704, 323,642	19,924, 283,800	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Ranwal RKPD-P Tahun-2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun-2024			
						Target	Rp			Target	Rp	Rp	Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	12	13			8			9
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	33001	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	64	827,499,286	PAD		66	817,651,286	817,651,286	1,000,000,000

Government)															
	3	3	0	1.	Keg	Administrasi	Persentase	%	90	329,760,000	PAD		90	329,760,000	329,760,000
	0	1	0	2	.	Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran								
	3	3	0	1. 0	Sub	Penyediaan	Jumlah	Doku	1	329,760,000	PAD		1	329,760,000	329,760,000
	0	1	0	2	Keg.	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	men							
	3	3	0	1.	Keg	Administrasi	Jumlah	lapor	0	0	PAD		0	0	0
	0	1	0	3	.	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	an							
	3	3	0	1. 0	Sub	Rekonsiliasi	Jumlah	Lapor	0	0	PAD		0	0	0
	0	1	0	5	Keg.	dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	an							
	3	3	0	1. 0	Sub	Penatausahaan	Jumlah	Lapor	0	0	PAD		0	0	0
	0	1	0	6	Keg.	Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	an							

3 0	3 1	0 0	1. 5	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 9 5	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 6	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	164,356,5 90	PAD	1	164,356 ,590	164,356 ,590
3 0	3 1	0 0	1. 1 6	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3,237,250	PAD	1	3,237,2 50	3,237,2 50
3 0	3 1	0 0	1. 2 6	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	51,028,19 0	PAD	1	51,028, 190	51,028, 190
3 0	3 1	0 0	1. 4 6	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0		PAD	0		
3 0	3 1	0 0	1. 5 6	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	27,055,15 0	PAD	1	27,055, 150	27,055, 150

3 0	3 1	0 0	1. 0	0 8	Sub Keg.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lapor an	0		PAD		0		
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 9	Sub Keg.	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	1	83,036,00 0	PAD		1	83,036, 000	83,036, 000
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 7	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lapor an	0	0	PAD		0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 1	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	PAD		0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 2	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	PAD		0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 5	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	PAD		0	0	0

3	3	0	1.	0	Sub	Pengadaan	Jumlah Unit	Unit	0		PAD		0	0	0	
0	1	0	0	6	Keg.	Peralatan dan	Peralatan dan									
			7			Mesin	Mesin Lainnya									
						Lainnya	yang									
						Disediakan	Disediakan									
3	3	0	1.	0	Sub	Pengadaan	Jumlah Unit	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
0	1	0	0	9	Keg.	Gedung	Gedung Kantor									
			7			Kantor atau	atau Bangunan									
						Bangunan	Lainnya yang									
						Lainnya	Disediakan									
3	3	0	1.	1	Sub	Pengadaan	Jumlah Unit	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
0	1	0	0	0	Keg.	Sarana dan	Sarana dan									
			7			Prasarana	Prasarana									
						Gedung	Gedung Kantor									
						Kantor atau	atau Bangunan									
						Bangunan	Lainnya yang									
						Lainnya	Disediakan									
3	3	0	1.		Keg	Penyediaan	Jumlah laporan	laporan	1	231,450,6	PAD		1	221,602	221,602	
0	1	0			.	Jasa	Penyediaan			96				,696	,696	
			8			Penunjang	Jasa Penunjang									
						Urusan	Urusan									
						Pemerintahan	Pemerintahan									
						n Daerah	Daerah									
3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah Laporan	Laporan	1	12,348,00	PAD		1	2,500,0	2,500,0	
0	1	0	0	1	Keg.	Jasa Surat	Penyediaan Jasa			0				00	00	
			8			Menyurat	Surat Menyurat									
3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah Laporan	Laporan	1	168,737,4	PAD		1	168,737	168,737	
0	1	0	0	2	Keg.	Jasa	Penyediaan Jasa			96				,496	,496	
			8			Komunikasi,	Komunikasi,									
						Sumber Daya	Sumber Daya									
						Air dan	Air dan Listrik									
						Listrik	yang Disediakan									
3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	PAD		0	0	0	
0	1	0	0	3	Keg.	Jasa Peralatan	Penyediaan Jasa									
			8			dan	Peralatan dan									
						Perlengkapan	Perlengkapan									
						Kantor	Kantor yang									
							Disediakan									

3 0	3 1	0 0	1. 0	0 4	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	1	50,365,20 0	PAD		1	50,365, 200	50,365, 200
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 9	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lapor an	1	101,932,0 00	PAD		1	101,932 ,000	101,932 ,000
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 1	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4,182,000	PAD		4	4,182,0 00	4,182,0 00
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 2	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	47,950,00 0	PAD		4	47,950, 000	47,950, 000

		3 3 0 1. 0 0 1 0 5 9	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 6 9	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	49,800,00 0	PAD		7	49,800, 000	49,800, 000	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 9 9	Sub Keg.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirh abilitas	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 1. 1 0 1 0 0 9	Sub Keg.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirh abilitas	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 0 6	Pro g.	Standardisas i dan Perlindunga n Konsumen	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	%	3	619,064,2 33	PAD		3	716,735 ,000	716,735 ,000	716,735 ,000
		3 3 0 1. 0 6 0 2	Keg	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek s	77	619,064,2 33	PAD		77	716,735 ,000	716,735 ,000	716,735 ,000

			Indeks Kinerja PSMB	Indeks	3	PAD	4				
3 3 0 1. 0 0 6 0 1 2	Sub Keg.	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komodi diti	3	140,645,3 00	PAD	3	179,183 ,750	179,183 ,750	
3 3 0 1. 0 0 6 0 2 2	Sub Keg.	Pengembang an Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Doku men	1	174,769,2 22	PAD	1	179,183 ,750	179,183 ,750	
3 3 0 1. 0 0 6 0 3 2	Sub Keg.	Pengembang an Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifi kat	2	123,142,4 00	PAD	2	179,183 ,800	179,183 ,800	
3 3 0 1. 0 0 6 0 4 2	Sub Keg.	Pengembang an Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifi kat	150	180,507,3 11	PAD	155	179,183 ,700	179,183 ,700	
Jumlah II (UPT. PSMB)						1,446,563, 519			1,534,3 86,286	1,534,3 86,286	1,716,7 35,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Ranwal RKPD-P Tahun-2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun-2024			
						Target	Rp			Target	Rp	Rp	Pagu Indikatif

1	2	3	4	5	6	12	13		8		9	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	3 3 0 0 1	Pro g. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	64	997,672,570	PAD	66	997,672,570	997,672,570	1,000,000,000
		3 3 0 1. 0 1 0 2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	90	635,160,000	PAD	90	635,160,000	635,160,000	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 2	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	635,160,000	PAD	1	635,160,000	635,160,000	
		3 3 0 1. 0 1 0 3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	0	0	PAD	0	0	0	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 5 3	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Laporan	0	0	PAD	0	0	0	

		Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD											
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 6	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 5	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	lapor an	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 9	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 6	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Doku men	1	89,776,600	PAD	1	89,776,600	89,776,600
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 1	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4,140,000	PAD	2	4,140,000	4,140,000
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 2	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	47,010,100	PAD	2	47,010,100	47,010,100

3 0 6	3 1 0 4	0 1 0 6	1. 0	0	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	PAD	0	0	0
3 0 6	3 1 0 5	0 1 0 6	1. 0	0	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	12,286,500	PAD	1	12,286,500	12,286,500
3 0 6	3 1 0 8	0 1 0 6	1. 0	0	Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	Lapor an	1	11,640,000	PAD	1	11,640,000	11,640,000
3 0 6	3 1 0 9	0 1 0 6	1. 0	0	Sub Keg.	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapor an	1	14,700,000	PAD	1	14,700,000	14,700,000
3 0 7	3 1 0 7	0 1 0 7	1. 0	0	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lapor an	0	0	PAD	0	0	0
3 0 7	3 1 0 1	0 1 0 7	1. 0	0	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0

3 3 0 1. 0 0 1 0 2 7	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0	
3 3 0 1. 0 0 1 0 5 7	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	PAD	0	0	0	
3 3 0 1. 0 0 1 0 6 7	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0		PAD	0	0	0	
3 3 0 1. 0 0 1 0 9 7	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0	-
3 3 0 1. 1 0 1 0 0 7	Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0	
3 3 0 1. 0 1 0 8	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	168,835,970	PAD	1	168,835,970	168,835,970	
3 3 0 1. 0 0 1 0 1 8	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	PAD	0	0	0	

3 3 0 1. 0 0 1 0 2 8	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapor an	2	164,635,9 70	PAD	2	164,635 ,970	164,635 ,970
3 3 0 1. 0 0 1 0 3 8	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lapor an	0	0	PAD	0	0	0
3 3 0 1. 0 0 1 0 4 8	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapor an	1	4,200,000	PAD	1	4,200,0 00	4,200,0 00
3 3 0 1. 0 1 0 9	Keg	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	lapor an	1	103,900,0 00	PAD	1	103,900 ,000	103,900 ,000
3 3 0 1. 0 0 1 0 1 9	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	75,000,00 0	PAD	8	75,000, 000	75,000, 000

		3 3 0 1. 0 0 1 0 2 9	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 5 9	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 6 9	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	28,900,00 0	PAD		40	28,900, 000	28,900, 000	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 9 9	Sub Keg.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirah abilitasi	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 1. 1 0 1 0 0 9	Sub Keg.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirah abilitasi	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 0 2	Pro g.	Perencanaan dan	Persentase Layanan IKM	%	100	1,003,341, 698	PAD		100	544,106 ,200	544,106 ,200	544,106 ,200

				Pembangunan Industri										
		3 3 0 1. 0 2 0 1		Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	IKM	959	1,003,341,698	PAD		1,044	544,106,200	544,106,200	544,106,200
		3 3 0 1. 0 0 2 0 5 1		Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	1,003,341,698	PAD		2	544,106,200	544,106,200	
Jumlah III (UPT. P2IPK)								2,001,014,268				1,541,778,770	1,541,778,770	1,544,106,200

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Ranwal RKPD-P Tahun-2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Rencana Tahun-2024			
						Target	Rp			Target	Rp	Rp	Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	12	13			8			9
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	3 3 0 0 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	64	404,633,815	PAD		66	404,633,815	404,633,815	1,000,000,000
		3 3 0 1. 0 1 0 2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	90	251,160,000	PAD		90	251,160,000	251,160,000	
		3 3 0 1. 0 1 0 2 2	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	251,160,000	PAD		1	251,160,000	251,160,000	
		3 3 0 1. 1 1 0 3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	0	0	PAD		0	0	0	

3	3	0	1.	0	Sub	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	PAD	0	0	0
1	1	0	0	5	Keg.									
			3											
3	3	0	1.	0	Sub	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	PAD	0	0	0
1	1	0	0	6	Keg.									
			3											
3	3	0	1.		Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	0	0	PAD	0	0	0
0	1	0	0	5										
3	3	0	1.	0	Sub	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	PAD	0	0	0
0	1	0	0	9	Keg.									
				5										
3	3	0	1.		Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	49,888,040	PAD	1	49,888,040	49,888,040
0	1	0	0	6										

3 0	3 1	0 0	1. 0	0 1	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 2	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	32,434,240	PAD	1	32,434,240	32,434,240
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 4	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 5	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1,583,800	PAD	1	1,583,800	1,583,800
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 8	Sub Keg.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lapor an	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 9	Sub Keg.	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi	Lapor an	1	15,870,000	PAD	1	15,870,000	15,870,000

		Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD											
3 0	3 1	0 0	1. 0 7	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	0	0	PAD	0	0	0	
3 0	3 1	0 0	1. 0 7	0 1	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0 7	0 2	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0 7	0 5	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	PAD	0	0	0
3 0	3 1	0 0	1. 0 7	0 6	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0

3 0	3 1	0 0	1. 9	0 7	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0	-
3 0	3 1	0 0	1. 0	1 7	Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	PAD	0	0	0	
3 0	3 1	0 0	1. 0	8	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	laporan	1	68,468,875	PAD	1	68,468,875	68,468,875	
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 1 8	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	PAD	0	0	0	
3 0	3 1	0 0	1. 0	0 2 8	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	66,968,875	PAD	1	66,968,875	66,968,875	

3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah	Lapor	0	0	PAD	0	0	0
0	1	0	0	3	Keg.	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	an						
3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah	Lapor	1	1,500,000	PAD	1	1,500,000	1,500,000
0	1	0	0	4	Keg.	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	an						
3	3	0	1.		Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	35,116,900	PAD	1	35,116,900	35,116,900
0	1	0	0	9										
3	3	0	1.	0	Sub	Penyediaan	Jumlah	Unit	1	2,356,900	PAD	1	25,856,900	25,856,900
0	1	0	0	1	Keg.	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							

		3 3 0 1. 0 0 1 0 2 9	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 5 9	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 6 9	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	32,760,000	PAD		5	9,260,000	9,260,000	
		3 3 0 1. 0 0 1 0 9 9	Sub Keg.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	0	0	PAD		0	0	0	
		3 3 0 1. 1 0 1 0 0 9	Sub Keg.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	0	0	PAD		0	0	0	

		3 3 0 0 6	Prog	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	90	1,454,830,150	PAD		90	1,516,735,000	716,735,000	716,735,000
		3 3 0 1. 0 6 0 1	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	laporan	1	1,127,415,000	PAD		1	1,158,367,500	358,367,500	358,367,500
		3 3 0 1. 0 0 6 0 1 1	Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	4	905,036,100	PAD		4	919,455,900	119,455,900	
		3 3 0 1. 0 0 6 0 2 1	Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	1	120,415,000	PAD		1	119,455,800	119,455,800	
		3 3 0 1. 0 0 6 0 3 1	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	40	101,963,900	PAD		42	119,455,800	119,455,800	
		3 3 0 1. 0 6 0 3	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau	Jumlah laporan barang beredar yang	laporan	1	327,415,150			1	358,367,500	358,367,500	358,367,500

						Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan									
3	3	0	1.	0	Sub	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	2	163,707,350	PAD		2	215,020,500	215,020,500	
0	6	0	0	1	Keg.											
			3													
3	3	0	1.	0	Sub	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	6	163,707,800	PAD		8	143,347,000	143,347,000	
0	6	0	0	2	Keg.											
			3													
Jumlah IV(UPT. P2K)										1,859,463,965				1,921,368,815	1,121,368,815	1,716,735,000
Jumlah I+II+III+IV										29,090,637,619				25,701,857,513	24,901,857,513	24,901,860,000

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

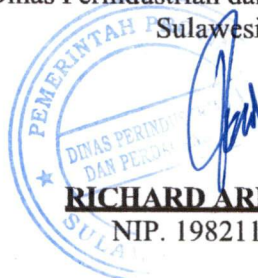
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5.3 Rencana tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik.

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya gunadan berhasil guna.

Palu,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE. MSA
NIP. 19821123 200604 1 00